



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2006

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

PEMBENTUKAN DESA MANSAHANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA MANSAHANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kecamatan Toili khususnya dan Kabupaten Banggai pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa Rusa Kencana guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat pemberian pelayanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili, maka dipandang perlu membentuk Desa Mansahang sebagai pemekaran dari Desa Rusa Kencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa Mansahang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;



4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

dan

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANSAHANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mansahang dalam wilayah Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 3

Desa Mansahang adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Rusa Kencana yang luasnya 581 Ha atau 5,81 KM<sup>2</sup>.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Mansahang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, luas wilayah Desa Rusa Kencana dikurangi luas wilayah Mansahang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Desa Mansahang mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Bumi Harjo (Km. 19) ;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Arga Kencana ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Mina Karya ;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Rusa Kencana Dusun III ;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Desa Mansahang secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



**Pasal 6**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Mansahang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Mansahang wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa atas petunjuk dan bimbingan Camat Toili sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Mansahang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

**Pasal 7**

Ibukota Desa Mansahang berkedudukan di Mansahang.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mansahang. Bupati, Camat Toili dan Kepala Desa Toili sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Mansahang sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan, yang meliputi :
  - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Toili yang berada dalam wilayah Desa Mansahang.
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Mansahang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Mansahang.

**Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Mansahang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mansahang.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006



**BUPATI BANGGAI,**

*(Signature)*  
**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006

**PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**












*(Signature)*  
**ISMAIL MUID**

**Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 7**



**LEGENDA**  
Desa Mansahang

-  Pemukiman Penduduk
-  Perkebunan / kebun
-  Masjid
-  Sungai
-  Jalan Poros Antar Desa
-  Batas Wilayah Desa
-  Jalan Setapak
-  Gurung
-  Sekolah

-57-

BUPATI BANGGAL,  
*[Signature]*  
MA'MUN AMIR

